UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PENGATURAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA ERA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
EDY PURWITO, Prof. Dr. Muchsan, S.H.; Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel

Abdurrahman, 1994, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Akademia Presindo, Cetakan Kedua, Jakarta.

Amrusyi, Fahmi, 1987, *Otonomi Dalam Negara Kesatuan*, Media Sarana Press, Jakarta.

Arraiyah, Hamdar, 2007, *Meneropong Fenomena Kemiskinan, Telaah Perspektif Al-Quran*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta,

Asshidiqie, Jimly, 2000, *Tata Urut Perundang-undangan dan Problema Peraturan Daerah*. Disampaikan dalam rangka lokakarya anggota DPRD se Indonesia, diselenggarakan di Jakarta.

_____, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Barat.

Baubock, Reiner, 2002, *United in Misunderstanding Asymmetry in Multinational Federalism*, ICE Working Paper Series. Nomor 26, Vienna: Research Unit for Institutional Change, Austrian Academy of Sciences

Budiardjo, Miriam, 1981, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.

Busroh, Abu Daud, 1990, *Ilmu Negara*, Bumi aksara, Jakarta.

Cheema, Shabbir dan Rondinelli, 1983, *Decentralization and Development, Policy Implementation In Diveloping Countries,* Sage Publications, Biverly Hill, California.

Hanum, Hard, 2001, *Teritorial Autonomy*: *Permanent Solustion or Step Toward Saccsion.* <http://www.indonesia missonny.org/issuebaru/Mission/empwr/paper_Hurst Hanunum_1.pdf>Cheema, Shabbir dan Rondinelli, 1983, *Decentralization and Development, Policy Implementation In Diveloping Countries,* Sage Publications, Biverly Hill, California.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PENGATURAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA ERA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
EDY PURWITO, Prof. Dr. Muchsan, S.H.; Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Cohen dan Peterson, dalam Ni'matul Huda, 2009, *Negara Kesatuan, Federal dan Konfederasi*, Nusa Media, Bandung.

Estiningsih, Muji, 2004. *Fungsi Pengawasan DPRD (Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Friedman, John, 1979, *Urban Poverty In Latin America, Some Theoritical Considerations*, dimuat dalam, Development, Vol. 1 Upsala, Dag Hammarskjold Foundation

Galbbraith, Jonh Kenneth, 1996, *The Effluent Society*, New York.

Hall, Anthony dan James Midgley, 2004, *Social Policy For Development*, Sage Publications, London.

Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.

Isworo, Waluyo Imam, 2002, *Pemberdayaan Organisasi Lokal Tingkat Desa (Kajian Tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) di Kabupaten Banyumas*, Fisipol Jurusan Administrasi, UI, Jakarta.

Kansil, C.S.T, 1989, *Hukum Tata Pemerintahan*, *Ghalia Indonesia*, Jakarta.

Karim, Abdul Gaffar, 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Kausar, 2006, *Otonomi Khusus dan Percepatan Pembangunan di Papua*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Kerlinger, Dalam Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Kertati, Indra, 2012, *Penerapan Good Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, dan di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah*, Fisipol, UGM, Yogyakarta.

Kusnardi, Mohamad dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN UI, dan PT Sinar Bakti, Jakarta.

Kusnardi, Muhammad dan Bintan R. Saragih, 1994, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PENGATURAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA ERA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
EDY PURWITO, Prof. Dr. Muchsan, S.H.; Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Latif, Abdul, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan Pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.

Litcack, Jenni, Junaidi Ahmad Junaidi, dan Richard Bird, 1998, *Rethinking Decentralization in Developing Countries*. Sector Studies Series Nomor 21491, Washington, The Wold Bank.

Lubis, M Solly, 1983, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung.

Manan, Bagir, 1994, *Ketentuan-Ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah, disajikan pada pertemuan ilmiah tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen LPND Dalam Pembangunan Hukum Diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

_____, 2005, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum, UII, Yogyakarta.

Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 1998, *Paranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Armico, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta.

_____, Dikutip oleh Sarundayang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta*.

Marbun ,S.F, 1988, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta

_____, 1997, *Peradilan Administratif Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

_____,dan Moh. Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

MD, Moh Mahfud, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

_____, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGATURAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA ERA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
EDY PURWITO, Prof. Dr. Muchsan, S.H.; Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

_____, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Miftachul, Huda, 2009, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administarsi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Linerty, Yogyakarta.

_____,1998, *Pembatasan Kekuasaan dalam Negara Kesejahteraan*, Dalam Hukum dan Kekuasan, FH, UII, Yogyakarta.

Muhadar, 2006, *Politik Hukum*, Sinar Grafia, Jakarta.

Nonet, Philipe and Philip Selznik, 1978, *Law and ociety In Transition, Toward Responsif Law*, Harper and Row Publishers, New York.

Notonegoro, 1975, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Bina Aksara, Jakarta.

Peter Haris dan Ben Reilly, 1998, *Democracy and Deep-Rooted Conflict: Options for Negotiators*. Stockholm, International Institute fo Democracy and Electoral Assistance.

Rahardjao, Satjipto , 1986, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.

_____, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta, Publishing Yogyakarta.

_____, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum* I*ndonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Rasyid, Ryaas, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Ogyakarta,

Retnowati Reni, 2001, *Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Berkelanjutan Dalam Rangka Menyongsong Otonomi Daerah di Kabupaten Sleman*, Tesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Riyanto, Astim, 2006, *Teori Negara Kesatuan*, Yapendo, Bandung.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PENGATURAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA ERA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
EDY PURWITO, Prof. Dr. Muchsan, S.H.; Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Salosa P, Jacobus, 2002, *Otonomi Khusus Papua Mengangkat Martabat Rakyat Papua Di Dalam NKRI*, Pestaka Sinar Harapan.

Sarifudin, Ateng, 1983, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Orasi Dies Natalis, Universitas Parahyangan, Bandung.

Soedarto, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, FH Universitas Cenderawasih, Jayapura.

Soekamto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Cetakan Kedua, Jakarta.

_____, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sholehatul Mustofa, 2005, *Kemiskinan Masyarakat Petani Desa di Jawa*, Unnes Press, Semarang.

Soehino, 2004, *Hukum Tata Negara*, Balai Percetakan Fakultas Ekonomi, UGM, Yogyakarta.
_____, 1997, *Hukum Tata Negara: Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah*, Liberty, Yogyakarta.

Sujamto, 1996, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia, Sinar Grafika*, Jakarta.

Soepomo. R, 1966, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, Jakarta.

Soetomo, 2009, *Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soetrisno, Lukman, 1988, *Negara dan Peranannya Dalam Menciptakan Pembangunan Desa Yang Mandiri*, Prisma, Jakarta.

Sophorn, Soeun, 2004, *Kebijaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Good Governance Studi Kasus: Program Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDE-DKE) Di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping*, Fisifol UGM Yaggyakarta.

Susanto, Astrid, 2000, *Sosiologi Pembangunan*, Bina Cipta, Bandung,

Suparlan, 1982, *Dinamika Program kemiskinan di Indonesia*, UII, Press, Yogyakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGATURAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA ERA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
EDY PURWITO, Prof. Dr. Muchsan, S.H.; Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

_____,1986, *Manusia Indonesia, Individu, Keluarga dan Masyarakat,* Akademia, Presindo, Jakarta,

Sumule, Sumule, 2003, *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Strong, C.F, 2004, *Modern Political Constitutions: an Introduce to Comparative Studi of their History and Exiting*, Terjemahan oleh Spa Team Work, Nuansa dan Nusamedia Bandung.

Suharto, Edy, 2005, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.

Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafia, Jakarta.

Swasono, Sri Edi, 1987, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*, UI Press, Jakarta.

Tanya, Bernard L, 2011, *Politik Hukum, Agendan Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Usman, Sunyoto, 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Vago, Stevan, 1981, *Law and Society*, Prentice Hall Icn, Engglewood Criffs, New Jersey.

Van Houten, Peter, 2004, *The International Politics of Autonomy Regime*s. University of Cambridge.

Warasih, Esmi, 1991, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Sosiologis*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya.

Wayong, J, 1975, *Asas dan Tujuan Pemerintah Daerah*, Balai Pustaka, Jakarta

_____1981, *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Jambatan, Jakarta

Wignyosoebroto, Sutandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsamhuma, Jakarta.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007, *Manajemen Pemberdayaan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGATURAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA ERA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
EDY PURWITO, Prof. Dr. Muchsan, S.H.; Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang *Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Penanganan Fakir Miskin* (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Menengah Mikro Kecil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PENGATURAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA ERA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
EDY PURWITO, Prof. Dr. Muchsan, S.H.; Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang *Majelis Rakyat Papua* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900)

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang *Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Uang Negara/Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah* (Lembaran Negara Republik Indonesia

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGATURAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA ERA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
EDY PURWITO, Prof. Dr. Muchsan, S.H.; Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang *Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.*

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Produk Hukum Daerah* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.*

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun Nomor 13 Tahun 2009 tentang *Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.*

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang *Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota.*

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang *Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan.*

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang *Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu.*

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 *tentang* Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarat.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGATURAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA ERA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
EDY PURWITO, Prof. Dr. Muchsan, S.H.; Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2008 tentang *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua.* (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 3).

Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Nomor 1 Tahun 2010 *tentang Pembentukan Dana Cadangan* (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 1).

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2008 tentang *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua* (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 4).

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Perekonomian Berbasis Kerakyatan* (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2080 Nomor 18).

Peraturan Daerah Khusus Nomor 3 Tahun 2013 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil* (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2012 Nomor 2).

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang *Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuanagan Dana Otonomi Khusus*. 3Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2012 Nomor 25).

Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 140 Tahun 2009 tentang *Pedoman, Jumlah, Lokasi dan Alokasi Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Untuk Pembangunan Distrik, Kelurahan dan Kampung melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, Rencana Strategi Pembangunan Kampung Provinsi Papua.*

Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Program Bantuan Keuangan Kepada Kampung.*

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGATURAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA ERA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
EDY PURWITO, Prof. Dr. Muchsan, S.H.; Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pemerintah Daerah, Kabupaten Sarmi, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang *Penetapan Dana Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan*.

C. Jurnal

Erlangga Agustino Landiyanto, 2011, "Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Papua Melalui Pengembangan Keuangan Mikro*"*, *FE, Universitas Airlangga*, Surabaya.

Feulner, Frank, 2005, *Menguatkan Demokrasi Perwakilan di Indonesia Kritis Terhadap Dewan Perwakilan Daerah*, Jurnal Hukum Jentera Edisi 8 Tahun III.

Ikrar Nusa Bhakti dan Natalius Pigay, 2012, "Menemukan Akar Masalah dan Solusi Atas Konflik Papua: Supenkah?, Dalam Pembangunan Papua Pusaran Politik", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9, Nomor 1.

Otong Rosadi, 2006, "Mensinerjikan Kesejahteraan Umum, Amanah Konstitusional", *Jurnal Hukum Republika*, Vollume 5, Nomor 2, hlm. 247.

Siti Komariah, 2009, "Otonomi Khusus dan Percepatan Pembangunan", *UPI*, Bandung.

Susetyo, Wasis, 2007, Konsep Walfere State Dalam Amandemen UUD 1945,: Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Beberapa Tinjauan MK RI*), Lex Jornalica*, Vol. 4, No. 2.

D. Media Cetak/Surat kabar

Barnabas Suebu, "*Memerangi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme", di Provinsi Papua*, Harian Cenderawasih Pos, 12 Februari 2007

Democratic Center, "*Grand Desain Pembangunan Papua Tidak Terkontrol"*, Harian Cenderawasih Pos, 12 Februari 2007

Dinas Kependudukan dan Permukiman, "*Bantuan Perumahan Selama Otonomi Khusus"*, Harian Cenderawasih Pos, tanggal 11 Nopember 215.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua, "*Satuan Tugas (Satgas) Kaki Telanjang Tahun Ini Jumlahnya Ditambah*," Harian Cenderawasih Pos, tanggal 11 Nopember 215

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PENGATURAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA ERA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
EDY PURWITO, Prof. Dr. Muchsan, S.H.; Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Suparlan, *"Kemiskinan dan Hukum Yang Membelenggu"*, Harian Kompas, tanggal 28 Nopember 2011.

Ketua DPRP Provinsi Papua, "*Menuju Papua Baru Bukan Jalan Yang Mudah*," Harian Cenderawasih Pos, 8 Mei 2012

Kepala BPS Provinsi Papua, "*Jumlah Pengangguran Di Provinsi Papua 60.501 Orang"*, Harian Cenderawasih Pos, 8 Oktober 2015

Kepala Badan Pemberdayaan Kampung Provinsi Papua, "*Tenaga Pendamping Dana Desa Harus Bekerja Maksima"l*, Harian Cenderawasih Pos, 28 Juli 2015

Krist Ansaka, "*Mepertaruhkan Jiwa Untuk Orang Kampung"*, Harian Cenderawasih Pos, 31 Juni 2011

……., "*Sudah Satu Triliun Dana Tunai Disalurkan Ke Kampung-Kampung"*, Harian Cenderawasih Pos, 19 Maret 2012

Sance Wanggai, "*Perempuan Papua belum diberyakan"*, Harian Cenderawasih Pos, 11 Nopember 2011

Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan, "*Realisasi Program Sejuta Rumah Terhambat Perizina*n", Harian Cenderawasih Pos, 12 Apri 2016

"U*U Otonomi Khusus Tidak Punya Tarin*g", Harian Cenderawasih Pos, 5 Oktober 2011

E. Media Elektronik/Internet

Waskito, "*Model Pendataan Fakir Miskin*", http://www. defenseinvestigator.com/article10.html; diakses tanggal 12 Oktober 2011.

Parsudi Suparlan "*Perbaikan Sistem bantuan Siswa Miskin*" http://www.metrotvnews. com/ mobile/mtrnews/66314, diakses tanggal 29 April 2013.

Rasadi, "*Kemiskinan*" http:/go.id, diakses 8 Februari 2012

Supartana, "*Peneyebab Kemiskinan*" http://www..or.id/content/, diakses pada tanggal 28 November 2013

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PENGATURAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA ERA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
EDY PURWITO, Prof. Dr. Muchsan, S.H.; Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Staf Kantor Bapeda Jawa Barat, "*Program Raskin*" www.bapeda-jabar.go.id, diakses 28 Mei 2014